

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PEMELIHARAAN JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

Oleh : Jefri Ermon

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Roads are the basic infrastructure infrastructure that humans need to be able to move from one location to another in order to fulfill needs, either as a land vehicle transportation route or distribution of goods and services. The formation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government aims to provide services in terms of providing public facilities needed by the community such as building and improving roads in Pekanbaru City. Therefore, the City Government, through the Public Works and Spatial Planning Office, is authorized to provide these services to the community.

This study aims to describe the implementation of concurrent government affairs in the Highways Sector at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office in road maintenance and the inhibiting factors of the Highways Sector in road maintenance in Pekanbaru City in 2018. The research location was conducted at the Public Works and Pekanbaru City Spatial Planning. Data collection techniques used are through interviews and documentation.

The results of this study are that the roles of the Highways Division of Pekanbaru City have not been maximized in carrying out their duties and functions in road maintenance, this can be seen from the total length of 1,277,900 Km roads in Pekanbaru City in 2018, only 46.196% which is categorized as Good. This means that 53.914% of roads are still damaged and maintenance must be carried out at these road points. Some of the inhibiting factors that are often experienced by the DGH sector in road maintenance are budget constraints, limited human resources, and lack of facilities and infrastructure. Of course this greatly affects the performance results of the Highways Division itself.

Keywords: *Government Affairs, Maintenance, Public Works Service and Spatial Planning, Road Maintenance.*

Pendahuluan

Meningkatnya aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat, peranan jalan akan semakin meningkat pula terutama dalam meningkatkan perekonomian dan jasa, cepat atau lambat jalan akan mengalami penurunan tingkat pelayanan. Khususnya pada jalan milik Kota yang berada di Kota Pekanbaru yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga. Jalanan kota di Pekanbaru saat ini banyak yang memprihatinkan, penulis sering menjumpai kerusakan jalan pada suatu ruas jalan, kerusakan ini bermacam-macam umumnya ada kerusakan jalan berupa retak-retak, berupa gelombang, juga kerusakan berupa alur/ cekungan arah memanjang jalan sekitar jejak roda kendaraan, ada juga berupa tumpukan aspal dipermukaan jalan, dan ada juga berupa lubang-lubang.

fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga, ini terlihat dari survei peneliti kelapangan bahwa kondisi Jalan Cipta Karya, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan dan Jalan Bangau Sakti, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, mengalami kerusakan yang tentu saja mengganggu aktifitas masyarakat.

Tabel 1
Kondisi dan Jenis Konstruksi Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Kondisi	Jenis	Km	%
Baik	Aspal	860,138	67,309
Sedang	Rigid	30,757	2,407
Rusak Ringan	Kerikil	77,825	6,090
Rusak Berat	Tanah	309,180	24,194
Jumlah		1.277,900	100

Sumber: Bidang Bina Marga, 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan Infrastruktur Jalan termasuk kedalam urusan Pemerintahan wajib

pelayanan dasar poin ke tiga yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu Dinas yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Bidang Bina Marga menetapkan Visi Bidang Bina Marga, yaitu: "Terwujudnya infrastruktur kebinamargaan yang unggul, nyaman, andal dan berkeselamatan dalam mewujudkan Kota Pekanbaru Smart City yang Madani" maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Infrastruktur kota dan mobilitas warga kota
2. Membangun jalan, trotoar dan drainase jalan kota dengan struktur yang berkualitas dan menjamin keselamatan pengguna jalan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan bidang bina marga.

Belum maksimalnya pelaksanaan pemeliharaan jalan milik Kota Pekanbaru oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru karena belum memadainya kinerja aparatur dan kelembagaannya dan hanya melakukan Pemeliharaan dan penanganan jalan masih mengacu kepada skala prioritas sehingga belum dapat memenuhi penanganan bagi keseluruhan panjang jalan kota sepanjang 1.277,900 KM sehingga tidak mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Urusan Pemerintah dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Tahun 2018. (2) Apa Faktor-Faktor Penghambat Bidang Bina Marga Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018. (2) Untuk mendeskripsikan Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Bina Marga Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Konsep Teori Kewenangan

Menurut Robbins (2002:275) mengatakan, Wewenang adalah sebagai salah satu hak untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk bertindak kearah pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian wewenang dari pimpinan ke bawahan akan memudahkan para jabatan dilevel menengah dan bawah untuk bertindak cepat serta dapat memutuskan sesuatu dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Menurut Nitisemito (1998:218) untuk melaksanakan pendelegasian wewenang dengan baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kemampuan mengkategorikan tugas-tugas.
2. Kemampuan untuk bertanggung jawab pada tugas dan wewenang yang diberikan.
3. Pendelegasian wewenang hendaknya dilaksanakan tidak sampai menimbulkan keragu-raguan.
4. Pendelegasian wewenang perlu adanya pembinaan dan motivasi.

Dengan demikian seorang pejabat tidak mungkin mampu menyelesaikan tugasnya sendiri kalau ia tidak mempunyai kekuasaan yang sah serta tidak mampu memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan tujuan organisasi.

Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokuskan pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan (Istianto, 2011: 29). Dharma Setyawan Salam merumuskan fungsi manajemen menjadi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf (Departemenisasi), penggerakan, pengendalian.

Manajemen pemerintahan ini bertujuan untuk mencapai hasil, mengembangkan keterampilan dan mengembangkan tanggung jawab, dapat dilakukan atau tidak dapat dilihat dari hasilnya. Manajemen umum secara terminologis diartikan “menguasai tidak langsung”. Yang dalam hal ini berarti

“menganjurkan sebuah keyakinan dan efisiensi hubungan ini dalam kebiasaan manajemen bisnis”(Nurjaman, Asep & Krisno, 2001).

Kerangka Pemikiran

Menurut G. R. Terry dalam bukunya juga menyatakan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Fungsi Perencanaan (*planning*)
- Fungsi Pengorganisasian (*organizing*)
- Fungsi Pelaksanaan / penggerakan (*actuating*)
- Fungsi Pengawasan (*controlling*)

Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap masalah yang akan diteliti, disamping itu juga untuk memudahkan dalam menganalisa.

- a. Infrastruktur : Infrastruktur adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor public dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
- b. Jalan : Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik sebagai jalur transportasi kendaraan darat atau pendistribusian barang dan jasa.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah perangkat daerah yang diserahkan kewenangan, tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum.
- d. Bina Marga : Bina Marga adalah salah satu Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam meningkatkan infrastruktur jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- e. **Urusan Pemerintahan Konkuren :** Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. **Tambal Sulam :** Tambal Sulam adalah memperbaiki sesuatu yang tidak menyeluruh atau hanya mengganti/memperbaiki bagian yang rusak.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 dengan melihat dan menilai bagaimana Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pemeliharaan Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2018. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena peneliti melihat langsung masih banyak kondisi jalan rusak yang ada di Kota Pekanbaru termasuk jalan-jalan yang sering peneliti lalui dan dibantu artikel-artikel pendukung yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. **Data Primer**, adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian.
- b. **Data sekunder**, yaitu data tidak langsung diberikan kepada pengumpul data/diperoleh dari pihak kedua. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah :
 - **Data Pemeliharaan jalan**
 - Kondisi dan jenis konstruksi jalan di Kota Pekanbaru
 - Dan data lainnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian, Informan ini adalah tokoh formal dan tokoh informal. Tokoh formal adalah Kepala Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru, sedangkan tokoh informal yaitu masyarakat sekitar jalan cipta karya yang memahami tentang permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

 - a. **Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik wawancara dimana peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara.

- b. **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumen berupa study kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku, jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, pendapat, dan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian (Sugiono, 2014).

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat krusial bagi masyarakat, segala jenis kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat sangat mengandalkan jalan sebagai akses masyarakat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain guna menyelesaikan segala jenis urusan. Jalan yang baik juga akan sangat berpengaruh, terutama mengenai keselamatan pengguna jalan dan juga waktu tempuh pengguna jalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018, maka diperoleh data hasil sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Kerja pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru

Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai dimasa depan serta menentukan berbagai tahapan

yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, perencanaan merupakan salah satu Fungsi Manajemen yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Syamsul Asyri, ST sebagai Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Kota bahwa pemeliharaan jalan di Kota Pekanbaru itu ada namanya OP (Operasional dan Pemeliharaan), OP sifatnya swakelola yaitu langsung turun kelapangan melakukan perbaikan jalan. OP hanya melakukan perbaikan jalan dengan cara penambalan lubang konstruksinya rusak ringan sedangkan konstruksi rusak berat dilakukan dengan cara pengaspalan ulang atau pemeliharaan berkala.

Inspeksi Kondisi jalan dilakukan oleh tim khusus yang bertugas untuk mengecek atau mensurvei langsung kelapangan kondisi jalan yang rusak. Dengan adanya tim khusus ini data-data yang dikumpulkan jadi lebih akurat dibanding laporan dari masyarakat dan dapat menjadi acuan, memilih, merencanakan, dan memprioritaskan jalan mana yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan oleh Bidang Bina Marga.

2. Pelaksanaan Perencanaan Teknik Jalan, Peralatan dan Pelaksanaan Preservasi Jalan

Pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan, dan pemeliharaan jalan dimulai pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus menerus / rutin dan berkesinambungan sesuai pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penelitian Jalan. Penanganan jalan dapat dilakukan secara berkala dan rutin.

Kegiatan inspeksi kondisi jalan di Kota Pekanbaru untuk tahun 2018 sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syamsul Asyri, ST sebagai Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mengatakan :

“untuk kegiatan inspeksi jalan di Kota Pekanbaru 2018 ada kita survey, kalau tak salah yang paling berat kerusakannya daerah tampan dan payung sekaki, dimana kecamatan tersebut berada dikawasan yang ramai dan sering dilalui oleh kendaraan dan sistem drainase yang

kurang baik yang mengakibatkan jalan cepat rusak.”(11 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Asyri, ST sebagai Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi jalan di Kota Pekanbaru tahun 2018 yang paling berat kerusakannya adalah di kecamatan tampan dan payung sekaki.

3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Preservasi Jalan

Tabel 2

Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017		Tahun 2018	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
55,370 %	44,350 %	56,112 %	46,196%

Pencapaian kinerja tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan 1,104%. Walaupun mengalami kenaikan dalam mencapai target dari tahun 2017 dan 2018 akan tetapi tetap saja Bidang Bina Marga belum bisa mencapai target. Realisasi Indikator ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap ruas jalan kota yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga diperoleh kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat.

Pembahasan

Faktor-Faktor Penghambat Bidang Bina Marga Dalam Pemeliharaan Jalan :

1. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhaimi Siregar. ST sebagai Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga bahwa anggaran yang diberikan APBD masih kurang karena masih banyak jalan yang membutuhkan pemeliharaan akan tetapi Bidang Bina Marga akan memaksimalkan dana yang ada.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Bidang Bina Marga kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas. Dengan jumlah pelaksanaan yang cukup banyak tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki Bidang Bina Marga. Selain itu dalam pelaksanaan dengan anggaran yang berkurang sekitar 18% menjadikan pelaksana (Kontraktor)

kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum bisa dikatakan memadai. Itu dapat kita lihat dari jumlah peralatan yang masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya jalan yang ada di Kota Pekanbaru yang membutuhkan pemeliharaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru belum maksimal dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam pemeliharaan jalan, dapat dibuktikan dari total panjang jalan 1.277,900 Km yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2018 hanya 46,196% yang dikategorikan kurang baik.
2. Faktor-faktor yang menghambat Bidang Bina Marga Dalam Pemeliharaan Jalan adalah
 - Keterbatasan Anggaran
 - Terbatasnya Sumber Daya Manusia
 - Kurangnya sarana dan prasarana Dinas PUPR

Saran

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru diharapkan dapat secara maksimal melaksanakan Tugas dan Fungsinya dan harus tanggap dan cepat dalam menangani kerusakan jalan yang terjadi karena hal ini merupakan permasalahan yang serius yang seharusnya cepat ditangani.
2. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kota Pekanbaru betul-betul melihat skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, diadakan pembinaan dan pelatihan serta penambahan jumlah pegawai agar Sumber Daya Manusia lebih kompeten lagi, dan untuk sarana dan prasarana yang

masih kurang sebaiknya mengajukan kepada pemerintah kota untuk diadakan penambahan.

Daftar Pustaka

- Nitisemito, S. 1998, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurjaman, Asep & Krisno, Hadi. 2001. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- R. Terry. George. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara
- Robbins, Stephen P. 2001, *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2017.

JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016(Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru)

JOM FISIP Vol. 1 No.2 Oktober 2014(Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Infrastruktur Jalan DiKecamatan Marpoyan Damai Tahun 2012)

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/05/06/dinas-pupr-pekanbaru-prioritaskan-sejumlah-ruas-jalan-untuk-diperbaiki>

<https://m.riapos.co/191190-berita-pupr-prioritaskan-jalan-rusak-paling-parah.html>